

HUBUNGAN ORIENTASI, PARTISIPASI POLITIK TERHADAP PERILAKU PEMILIH DALAM PILKADA WALIKOTA KUPANG 2017

Andry Juliansyah
Universitas Nusa Cendana, Kupang

ABSTRACT

This research looks at the relationship between independent and dependent variables, with the formulation of the problem is: (1) the relationship of Political Orientation to Voter Behavior (2) the relationship of Political Participation to Voter Behavior (3) the relationship of Political Orientation to Voter Political Participation (4) the relationship of Political Orientation and Political Participation to Voter Behavior. The approach used in this study is a quantitative approach, while the data collection techniques used were, questionnaire and documentation study. Result of the study (1) Variable X1 to variable Y r value 0,237 is a positive relationship, t_h value 2,072 > t_t 1,66629 there is significant relation. (2) Variable X2 to variable Y r value 0,345 is a positive relationship, t_h 3.124 > t_t 1.66629 there is significant relationship. (3) variable X1 to variable X2 r value 0,726 is a positive relationship, value t_h 1.728 > t_t 1.66629 is a significant relationship. (4) Variables X1 and X2 (collectively) to the variable Y value r 0.411, it can be a relationship, whereas the contribution together is 16.9% while 83.1% is determined by another variable, the value of Sig. F change 0,001 < 0,05, significant relation, F value = 7,303 > 3,12 (F table value) and sig = 0,001 < 0,05 this mean together significant correlation. Based on the results, it can be concluded, (1) There is a positive significant relationship X1 to Y, (2) There is a positive significant relationship X2 to Y, (3) There is a positive significant relationship X1 to X2, (4) There is a significant relationship together, between X1 and X2 to Y.

Keywords: Political Orientation, Political Participation and Voter Behavior

ABSTRAK

Penelitian ini mencari hubungan antara variabel bebas dan terikat, dengan rumusan masalah adalah: (1) Adakah hubungan Orientasi Politik terhadap Perilaku Pemilih (2) Adakah hubungan Partisipasi Politik terhadap Perilaku Pemilih (3) Adakah hubungan Orientasi Politik terhadap Partisipasi Politik Pemilih (4) Adakah hubungan Orientasi Politik dan Partisipasi Politik terhadap Perilaku Pemilih. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dan studi dokumentasi. Hasil penelitian adalah (1) Variabel X1 terhadap variabel Y nilai r 0,237 terdapat hubungan positif, nilai t_h 2,072 > t_t 1,66629 terdapat hubungan signifikan. (2) Variabel X2 terhadap variabel Y nilai r 0,345 terdapat hubungan positif, nilai t_h 3,124 > t_t 1,66629 terdapat hubungan signifikan. (3) variabel X1 terhadap variabel X2 nilai r 0,726 terdapat hubungan positif, nilai t_h 1,728 > t_t 1,66629 terdapat hubungan signifikan. (4) Variabel X1 dan X2 (secara bersama-sama) terhadap variabel Y nilai r 0,411, terdapat hubungan, sedangkan kontribusi secara bersama-sama adalah 16,9% sedangkan 83,1% ditentukan oleh variabel lain, nilai Sig. F change 0,001 < 0,05, hubungan signifikan, nilai F = 7,303 > 3,12 (nilai F tabel) dan sig = 0,001 < 0,05 ini berarti secara bersama-sama berhubungan signifikan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan, (1) Terdapat hubungan signifikan positif X1 terhadap Y. (2) Terdapat hubungan signifikan positif X2 terhadap Y. (3) Terdapat hubungan signifikan positif X1 terhadap X2. (4) Terdapat hubungan signifikan bersama-sama, antara X1 dan X2 terhadap Y.

Kata kunci: Orientasi Politik, Partisipasi Politik, dan Perilaku Pemilih

PENDAHULUAN

Sebagai suatu ilmu, pada dasarnya politik memiliki ruang lingkup yang sangat luas tidak hanya suatu cara untuk mewujudkan tujuan, tetapi juga membicarakan negara, karena mempelajari politik pasti akan juga menyelidiki negara sebagai lembaga politik yang mempengaruhi hidup masyarakat. Salain itu politik menyelidiki ide-ide, asas-asas, sejarah pembentukan negara, hakekat negara serta bentuk dan tujuan negara, di samping menyelidiki pressure group, interest group, elit politik, peranan partai politik (parpol), dan pemilihan umum (pemilu).

Memahami situasi politik dewasa ini memang tidak sederhana. Banyak sudah analisis yang menyimpulkan bahwa dalam satu dekade reformasi, kita masih menikmati demokrasi prosedural. Lembaga-lembaga demokrasi bekerja sesuai mekanisme formal yang tersedia. Para politisi dan pejabat publik bekerja dengan mekanisme yang dikreasi menurut kepentingan dan persepsi mereka tentang kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Roda pemerintahan terus berputar menghasilkan layanan sesuai prosedur birokrasi. Pemilu digelar secara regular, angka partisipasi pemilih digenjut setinggi-tingginya, namun koneksi antara yang terpilih dengan yang memilih kian jauh.³²

Mengetahui dinamika politik Indonesia di tingkat lokal itu penting sekali untuk bisa memprediksi eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di masa depan. Selain itu, memahami dinamika politik lokal itu juga akan memperkaya wawasan dan pengetahuan politik Indonesia, ini penting untuk diketahui sehingga dapat menyikapi segala bentuk dinamika yang terjadi.

Orientasi politik bisa juga diartikan sebagai budaya politik yakni banyak definisi tentang budaya politik, tetapi pada prinsipnya yang dimaksud dengan istilah ini tidak lain adalah sikap orientasi yang khas dari warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada dalam sistem itu.³³

Orientasi politik masih dalam tataran pemikiran individu, namun setelah itu akan terbentuk sebuah partisipasi politik dan individu akan berperilaku politik yaitu dalam hal memilih pada pemilu yang juga disebut sebagai partisipasi politik. Orientasi politik ini juga merupakan keputusan yang menyangkut dan mempengaruhi perilaku politik seseorang yang akan berdampak kepada pilihan pemilih.

Partisipasi berbeda-beda dalam suatu sistem politik dengan sistem politik lain sangat penting. Hal ini karena pengaruh ruang waktu setempat termaksud budaya politik masyarakatnya. Akan terdapat berbagai pembatasan pada partisipasi politik ada yang formal dan ada pula yang informal. Bahkan ada kelompok apatis (masa bodoh) yang menghindarkan diri dari segala kegiatan politik, maksudnya tidak peduli dengan pemilu, sidang umum, adanya kepartaian, namun tetap menghindarkan diri dari terjadinya keributan.³⁴

Di negara-negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, lebih baik. Tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami

³² Tim Puskapol. 2014. *Buku Panduan Pendidikan Pemilih Tentang Transaksi Politik Dalam Pemilu*. Pusat Kajian Politik-Departemen Ilmu Politik Fisip-UI.

³³ Menurut Almond & Verba (dalam Bau, 2003: 30) Bau Koli Yanuarius. 2003. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama.

³⁴ Syafii Kencana Inu. 2008. *Teori dan Analisis Politik Pemerintahan: Dari Orde Lama, Orde Baru Sampai Reformasi*. Jakarta: PT. Perca.

masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan.³⁵

Pada pendekatan perilaku umumnya meneliti tidak hanya perilaku dan kegiatan manusia, melainkan juga orientasinya terhadap kegiatan tertentu seperti sikap, motivasi, persepsi, evaluasi, tuntutan, harapan, dan sebagainya. Berdasarkan anggapan bahwa perilaku politik hanya salah satu dari keseluruhan perilaku, maka pendekatan ini cenderung untuk bersifat interdisipliner. Ia tidak saja mempelajari faktor pribadi, tetapi juga faktor-faktor lainnya seperti budaya, sosiologis, dan psikologis.³⁶

Perilaku pemilih dalam memilih dan memberikan suara dan menentukan siapa yang akan dipilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pilkada secara langsung. Pemberian suara atau voting secara umum dapat diartikan sebagai; sebuah proses di mana seorang anggota dalam suatu kelompok menyatakan pendapatnya dan ikut menentukan konsensus diantara anggota kelompok seorang pejabat maupun keputusan yang diambil.

Pemilu memiliki tujuan ideal, salah satunya pemilu adalah sarana pergantian kepemimpinan politik berdasarkan konstitusi. Dalam sistem demokrasi, pergantian pemimpin harus dilakukan melalui pemungutan suara oleh rakyat yang telah memenuhi syarat dan terdaftar sebagai pemilih, dilaksanakan oleh lembaga penyelenggaraan yang mandiri, adanya jaminan akses terhadap informasi, serta adanya kebebasan dalam menentukan pilihan. Ringkasnya pemilu merupakan prosedur menghasilkan pemimpin secara damai dan berkualitas.

Pemilihan umum adalah suatu proses dari sistem demokrasi, hal ini juga sangat penting dalam kehidupan bernegara. Dalam pemilihan umum, rakyat berperan penuh untuk memilih siapa wakilnya yang layak menduduki parlemen dan struktur pemerintahan. Sistem politik di Indonesia sendiri telah menggunakan hak rakyat dalam pemilihan presiden dan kepala daerah. Dalam pemilihan kepala daerah seperti gubernur dan bupati/walikota sejak Indonesia merdeka hanya dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat, maka menurut ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 harus dilakukan pemilihan langsung.

Pada Pilkada Kota Kupang tahun 2017, ada dua pasangan calon (Paslon) yang bertarung untuk merebut kursi orang nomor satu di Kota Kupang. Pertama paslon dengan nomor urut satu Jefirstson Riwu Kore - Hermanus Man (FirManMu) dan paslon dengan nomor urut dua Jonas Salean-Nikolaus Fransiskus (Sahabat), dua paslon ini siap bersaing untuk merebut hati para pemilih yang ada di Kota Kupang.

Pemilih di Kota Kupang yang penduduknya cukup beragam, memiliki ikatan primordial sehingga bisa jadi orientasi politik para pemilih dalam memilih kepala daerahnya bukan berdasarkan visi misi atau program kerja yang bagus dari paslon nomor urut satu (FirManMu) dan paslon nomor urut dua (Sahabat), melainkan karena faktor lain, seperti suku, ras, dan agama. Faktor ini bisa saja mempunyai hubungan dengan partisipasi politik dan perilaku pemilih Kota Kupang.

Penduduknya cukup beragam, plural, dan berpengaruh terhadap berkembangnya dinamika politik di Indonesia khususnya di Kota Kupang. Akibatnya, perilaku pemilih Kota Kupang susah untuk dideteksi dan diketahui. Masalah ini mendorong peneliti ingin meneliti hubungan antara

³⁵ Budiardjo Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

³⁶ Budiardjo Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

orientasi politik dan partisipasi politik terhadap perilaku pemilih Kota Kupang dalam memilih walikota dan wakil walikotanya pada tahun 2017.

METODOLOGI

Penelitian ini mencari hubungan antara orientasi dan partisipasi politik terhadap perilaku pemilih Kota Kupang dalam memilih walikota dan wakil walikotanya pada tahun 2017. Untuk itu, hubungan antara variabel bebas dan terikat akan menjadi perhatian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Orientasi, partisipasi, dan perilaku pemilih merupakan tiga kata kunci dalam penelitian ini.

(1) Orientasi

Orientasi politik bisa juga diartikan sebagai budaya politik yakni secara umum merupakan pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik. Istilah ini melekat pada setiap masyarakat yang terdiri atas sejumlah individu yang hidup, baik dalam sistem politik tradisional, transisional, maupun modern.³⁷

Orientasi politik memiliki posisi penting karena mampu mempengaruhi perilaku politik seseorang, termaksud dalam membangun demokrasi. Melalui studinya di lima negara, *Gabriel Almond* dan *Sydney Verba* melihat bahwa orientasi politik kewarganegaraan itu sangat cocok bagi bangunan negara demokrasi. Kombinasi antara karakteristik aktif rasional, mempunyai informasi yang cukup mengenai politik, kesetiaan pada sistem politik, kepercayaan dan kepatuhan kepada pemerintah, keterikatan pada keluarga, suku, dan agama.³⁸

Orientasi politik membicarakan fenomena masyarakat, tetapi dalam membicarakan politik secara luas, merupakan faktor yang mengkaji berbagai pola perilaku seseorang atau sekelompok orang yang orientasinya berkisar tentang kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum norma kebiasaan yang berjalan, dipikir, dikerjakan, dan dihayati oleh anggota masyarakat setiap harinya.³⁹

(2) Partisipasi

Suatu masyarakat demokrasi tergantung pada konsensus sosial dengan pandangan pada perkembangan manusia, yang menurut *Dewey*, didasarkan atas kebebasan, persamaan, dan partisipasi politik. Partisipasi merupakan hal yang vital bagi pemilihan kebijakan, karena konsensus atau mayoritas itu sendiri merupakan landasan yang perlu bagi keputusan sosial dan tindakan partisipasi.⁴⁰ Tingkat kesadaran partisipasi itu memang bertingkat-tingkat menurut pengertian, persetujuan, dukungan dan kepercayaan masyarakat. ada enam tingkat kesadaran tanggungjawab partisipasi, yaitu:

³⁷ Maksudi Iriawan Beddy. 2013. *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoretik dan Empirik*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.

³⁸ Rauf Maswadi & Noor Firman, dkk. 2009. *Sistem Presidensial & Sosok Presiden Ideal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

³⁹ Syafiie Kencana Inu & Azhari. 2009. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditma.

⁴⁰ Varma S. P. 2001. *Teori Politik Modern*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- a. Partisipasi dengan menerima saja apa adanya
- b. Partisipasi sukarela karena terangsang oleh ganti rugi penghargaan dalam bentuk apapun (*reward*)
- c. Partisipasi sukarela yang timbul karena kesadaran (*awareness*)
- d. Partisipasi dengan memberikan anjuran-anjuran dan mengajukan kritik-kritik untuk perbaikan suatu kegiatan
- e. Partisipasi dengan mengambil prakarsa
- f. Partisipasi dengan melaksanakan suatu program (*creative participation*).⁴¹

Merujuk pada the 1995-97 *World Value Survey*, Charles Andrain dan Smith, mengelompokkan tiga bentuk partisipasi. Pertama, partisipasi yang lebih pasif. Partisipasi dilihat dari keterlibatan politik seseorang, sejauh mana orang itu melihat politik sebagai sesuatu yang penting, memiliki minat terhadap politik, dan sering berdiskusi mengenai isu-isu politik. Kedua, partisipasi aktif, sejauh mana orang itu terlibat di dalam organisasi atau asosiasi sukarela (*voluntary associations*). Ketiga, partisipasi berupa kegiatan protes, seperti ikut menandatangani petisi, melakukan boikot, dan demonstrasi.⁴²

(3) *Perilaku Politik*.

Perilaku politik (*political behavior*) adalah suatu telaahan mengenai tindakan manusia dalam situasi politik. Situasi politik sangat luas cakupannya, antara lain: pengertian respons emosional berupa dukungan maupun apatis kepada pemerintah, respons terhadap perundang-undangan, dan lain-lain. Jadi, dengan demikian perilaku para pemilih atau pemberi suara dalam pemilihan umum. Tindakan dan perilaku politik individu sangat ditentukan oleh pola orientasi umum yang tampak secara jelas sebagai pencerminan budaya politik.⁴³

Interaksi antara pemerintah dan masyarakat di antara lembaga-lembaga pemerintah dan di antara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik, pada dasarnya merupakan perilaku politik. Di tengah masyarakat, individu berperilaku dan berinteraksi, sebagian dari perilaku dan interaksi dapat dicermati akan berupa perilaku politik, yaitu perilaku yang bersangkutan dengan proses politik.⁴⁴

Perlu dicatat bahwa pendidikan kewarganegaraan yang diberikan berfokus pada perubahan perilaku pemilih terhadap penyuaipan. Perkembangan ini menyebabkan para pemilih sangat sulit menahan godaan untuk tidak menerima suap. Tetapi terdapat kecenderungan di antara para pemilih untuk tidak terpengaruh penyuaipan dalam perilaku pemilih. Oleh karena itu, pendidikan

⁴¹ Soenarko. 2005. *Public Policy: Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisis Kebijakan Pemerintah*. Surabaya: Airlangga University Press.

⁴² Rauf Maswadi & Noor Firman, dkk. 2009. *Sistem Presidensial & Sosok Presiden Ideal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

⁴³ Maksudi Iriawan Beddy. 2013. *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoretik dan Empirik*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.

⁴⁴ Surbakti Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo.

kewarganegaraan mungkin telah mencapai keberhasilan lebih besar melalui pelatihan bagi para pemilih untuk tidak terpengaruh oleh penyuapan.⁴⁵

Pendekatan perilaku melihat kegiatan politik sebagai sebuah sistem perilaku manusia dan merupakan bagian dari perilaku manusia secara keseluruhan dan di dalamnya terdapat sejumlah proses, terutama proses yang berkaitan dengan pembagian nilai dalam masyarakat. Dengan demikian pendekatan ini mengakui adanya sistem lain disamping sistem politik.⁴⁶

(4) *Pilkada*

Pilkada merupakan sebagian kecil dari pelaksanaan sekaligus proses demokrasi di aras lokal, karena mekanisme ini hanya memberi ruang partisipasi yang amat terbatas dalam proses demokrasi pada aspek pemberian suara semata. Sementara aspek demokrasi yang lebih luas terdapat pada skop politik keseharian (*days to days politics*) justru yang berlangsung setelah Pilkada itu berlangsung sehingga datang pemilihan selanjutnya.⁴⁷

Beberapa keuntungan ketika Pilkada langsung dilaksanakan. Pertama, terwujudnya legitimasi politik pimpinan daerah. Hal ini karena kepala daerah yang dipilih mendapatkan mandat dan legitimasi yang sangat kuat karena didukung langsung oleh suara pemilih yang nyata (*real voters*). Kedua, Pilkada langsung mampu membangun serta mewujudkan *local accountability*. Ketika seorang kandidat terpilih sebagai kepala daerah, maka mereka akan meningkatkan kualitas akuntabilitasnya. Ketiga, optimalisasi *equilibrium checks and balances* antara lembaga-lembaga negara dapat berujung pada pemberdayaan masyarakat lokal. Keempat, pilkada langsung akan meningkatkan kesadaran politik masyarakat terutama yang berkaitan dengan kualitas partisipasi publik.⁴⁸

Kepala daerah dipilih langsung oleh masyarakat, hal ini merupakan wujud dari pengisian pejabat publik oleh masyarakat sehingga diharapkan pertanggungjawabannya kepada masyarakat menjadi lebih konkret. Sebagai bagian dari desentralisasi; membangun struktur politik lokal menjadi lebih demokratis, membentuk birokrasi lokal yang efektif, efisien, setara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lebih baik.⁴⁹

Konteks kebijakan publik masyarakat bersama demokrasi konstitusional merupakan bagian dari paradigma serta sistem nilai yang menaungi dan hendak dibangun dalam kehidupan politik dan sistem administrasi negara. Sehingga disinilah kebijakan publik menentukan orientasi dan konstruksi sosialnya. Seyogyanya setiap proses kebijakan publik diarahkan dan diorientasi oleh para analis kebijakan kearah sistem nilai tersebut yang pada akhirnya akan melahirkan output kebijakan publik yang khas, berbobot, berdaya saing, berkarakter, dan pro terhadap kesejahteraan masyarakat.⁵⁰

⁴⁵ Sano Otto Hans & Alfredsson Gudmundur. 2003. *Hak Asasi Manusia dan Good Governance: Membangun Suatu Keterkaitan*. Jakarta: CV. Rencong Jaya Sakti.

⁴⁶ Bau Koli Yanuarius. 2003. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama.

⁴⁷ Agustino Leo. 2014. *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*. Bandung: Alfabet.

⁴⁸ Agustino Leo. 2014. *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*. Bandung: Alfabet.

⁴⁹ Hamid Farid & Budianto Heri. 2011. *Ilmu Komunikasi: sekarang dan Tantangan Masa Depan*. Jakarta: Kencana.

⁵⁰ Hendri Deni Denden. 2016. *Argumentasi Kebijakan Uji Publik Calon Kepala Daerah: Dilengkapi Undang-Undang Pilkada*. Depok: Pustaka Kemang.

Pilkada langsung sebagai langkah awal sekaligus sebuah pintu gerbang pembangunan daerah serta memahami Pilkada langsung sebagai faktor non ekonomi yang memberikan pondasi untuk membangun stabilitas sosial dan politik yang kondusif di mana pembangunan akan tumbuh dan berkembang. Dalam konteks pembangunan kontemporer yang tumbuh sejajar dengan semangat demokrasi lokal dewasa ini, pembangunan ekonomi tidak akan tumbuh begitu saja tanpa disertai dengan pembangunan aspek sosial politik non ekonomi.⁵¹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara

Pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Walikota tahun 2017 berjumlah 166.621 pemilih, sedangkan pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya berjumlah 74.478 pemilih. Suara sah pada Pilkada Walikota tahun 2017 berjumlah 164.905 suara, sedangkan Tidak Sah berjumlah 1.716 suara. Perolehan suara pasangan calon di Kecamatan Oebobo yaitu Jefirstson R. Riwu Kore dan Hermanus Man berjumlah 19.988 suara, sedangkan perolehan suara pasangan calon Jonas Salean dan Nikolaus Fransiskus berjumlah 16.157 suara. Perolehan suara pasangan calon di Kecamatan Kota Raja yaitu Jefirstson R. Riwu Kore dan Hermanus Man berjumlah 11.902 suara, sedangkan perolehan suara pasangan calon Jonas Salean dan Nikolaus Fransiskus berjumlah 10.886 suara. Perolehan suara pasangan calon di Kecamatan Maulafa yaitu Jefirstson R. Riwu Kore dan Hermanus Man berjumlah 20.207 suara, sedangkan perolehan suara pasangan calon Jonas Salean dan Nikolaus Fransiskus berjumlah 15.855 suara. Perolehan suara pasangan calon di Kecamatan Kelapa Lima yaitu Jefirstson R. Riwu Kore dan Hermanus Man berjumlah 13.424 suara, sedangkan perolehan suara pasangan calon Jonas Salean dan Nikolaus Fransiskus berjumlah 11.976 suara. Perolehan suara pasangan calon Jefirstson R. Riwu Kore dan Hermanus Man berjumlah 87.160 suara, sedangkan perolehan suara pasangan calon Jonas Salean dan Nikolaus Fransiskus berjumlah 77.745 suara.

2. Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang

Dari hasil data yang di dapat dari KPU Kota Kupang, Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada Walikota Kupang tahun 2017 adalah 241.099 pemilih, dimana daftar pemilih laki-laki berjumlah 119.692 pemilih dan perempuan berjumlah 121.407 pemilih, sedangkan pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 166.621, dimana daftar pemilih laki-laki berjumlah 81.454 pemilih dan perempuan berjumlah 85.167 pemilih.

Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya berjumlah 74.478 pemilih, jadi persentase partisipasi politik pada Pilkada Walikota Kupang tahun 2017 sebesar 69,1% berjumlah 166,621 pemilih dari DPT pada Pilkada Walikota Kupang tahun 2017 adalah 241.099 pemilih, sedangkan persentase pemilih yang tidak berpartisipasi sebesar 30,9%, Kota Kupang tidak mampu memenuhi target nasional yang telah ditetapkan sebesar 75,5% dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT.

Hasil perolehan suara pasangan Jefirstson R. Riwu Kore dan Hermanus Man pada Kecamatan Oebobo berjumlah 19.988 suara, mengungguli pasangan Jonas Salean dan Nikolaus Fransiskus berjumlah 16.157 suara. Paket FirmanMu hampir menang disetiap kelurahan dilingkup

⁵¹ Budiman Arief. 1995. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Kecamatan Oebobo, kecuali di Kelurahan Oetete yang dimenangkan oleh paket Sahabat. Di Kecamatan Kota Raja juga paslon nomor urut satu menang dengan suara 11.902 suara, sedangkan paslon nomor urut dua dengan suara 10.886 suara, ada delapan kelurahan dilingkup Kecamatan Kota Raja, di mana paket FirmanMu menang di enam kelurahan dan paket Sahabat menang di dua kelurahan yaitu Kelurahan Kuanino dan Nunle'u. Paslon nomor urut satu juga mengguguli paslon nomor urut dua di Kecamatan Maulafa dengan jumlah suara 20.207 berbanding 15.855 suara, di Kecamatan Maulafa ada sembilan kelurahan, di mana paslon nomor urut satu menang di tujuh kelurahan dan paslon nomor urut dua menang di dua kelurahan yaitu Kelurahan Maulafa dan Penfui. Paket FirmanMu menang di semua (lima) kelurahan dilingkup Kecamatan Kelapa Lima dengan jumlah suara 13.424 suara, mengguguli jumlah suara paket Sahabat dengan 11.976 suara.

Perolehan suara pasangan calon nomor urut satu Jefirstson R. Riwu Kore dan Hermanus Man hampir menang di semua kecamatan kecuali di kecamatan Kota Lama yang di menangkan pasangan calon nomor urut dua Jonas Salean dan Nikolaus Fransiskus, Kecamatan Maulafa yang memberikan suara paling banyak pada paslon satu sebesar 23,2% berjumlah 20.217 suara, sedangkan untuk paslon 2 Kecamatan Oebobo sebesar 20,8% berjumlah 16.157 suara. Suara paling sedikit paslon satu pada Kecamatan Kota Lama sebesar 6,7% berjumlah 5.883 suara, sedangkan paslon dua juga sama pada Kecamatan Kota Lama sebesar 10,3% berjumlah 7.978 suara.

Jumlah Suara Sah pada Pilkada Walikota Kupang tahun 2017 adalah 164.905 suara, sedangkan suara yang tidak sah berjumlah 1.716 suara. Jumlah perolehan suara pasangan calon nomor urut satu Jefirstson R. Riwu Kore dan Hermanus Man adalah 87.160 suara, sedangkan jumlah perolehan suara pasangan calon nomor urut dua Jonas Salean dan Nikolaus Fransiskus adalah 77.745 suara. Jadi Pilkada Walikota Kupang tahun 2017 di menangkan oleh pasangan nomor urut satu Jefirstson R. Riwu Kore dan Hermanus Man dengan persentase 52,85% berbanding 47,15%.

3. Hasil Uji Hipotesis

a) Hubungan Orientasi Politik terhadap Perilaku Pemilih

Berdasarkan perhitungan korelasi sederhana nilai r antara variabel X_1 terhadap variabel Y adalah 0,237. Dari hasil pengujian menunjukkan terdapat hubungan positif antara Orientasi Politik terhadap Perilaku Pemilih, sehingga hipotesis (Ada hubungan Orientasi Politik terhadap Perilaku Pemilih) dalam penelitian ini dapat diterima (H_0 ditolak dan H_a diterima). Dapat disimpulkan bahwa ada hubungan positif antara Orientasi Politik terhadap Perilaku Pemilih Kota Kupang dalam Pilkada Walikota Kupang Tahun 2017.

Berdasarkan perhitungan korelasi sederhana signifikansi dengan uji t , t_{hitung} antara Orientasi Politik terhadap Perilaku Pemilih adalah $t_h 2,072 > t_t 1,66629$ yang berarti terdapat hubungan signifikan antara Orientasi Politik terhadap Perilaku Pemilih. Dapat disimpulkan bahwa apabila Orientasi Politik mempunyai hubungan signifikan terhadap Perilaku Pemilih, maka Perilaku Pemilih juga mempunyai hubungan signifikan terhadap Orientasi Politik dalam Pilkada Walikota Kupang Tahun 2017.

b) Hubungan Partisipasi Politik terhadap Perilaku Pemilih

Berdasarkan perhitungan korelasi sederhana nilai r antara variabel X_2 terhadap variabel Y adalah 0,345. Dari hasil pengujian menunjukkan terdapat hubungan positif antara Partisipasi Politik terhadap Perilaku Pemilih, sehingga hipotesis (Ada hubungan Partisipasi Politik terhadap Perilaku Pemilih) dalam penelitian ini dapat diterima (H_0 ditolak dan H_a diterima). Dapat disimpulkan bahwa ada hubungan positif antara Partisipasi Politik terhadap Perilaku Pemilih Kota Kupang dalam Pilkada Walikota Kupang Tahun 2017.

Berdasarkan perhitungan korelasi sederhana signifikansi dengan uji t , t_{hitung} antara Partisipasi Politik terhadap Perilaku Pemilih adalah $t_h 3,124 > t_t 1,66629$ yang berarti terdapat hubungan signifikan antara Partisipasi Politik terhadap Perilaku Politik. Dapat disimpulkan bahwa apabila Partisipasi Politik mempunyai hubungan signifikan terhadap Perilaku Pemilih, maka Perilaku Pemilih juga mempunyai hubungan signifikan terhadap Partisipasi Politik dalam Pilkada Walikota Kupang Tahun 2017.

c) Hubungan Orientasi Politik Terhadap Partisipasi Politik

Berdasarkan perhitungan korelasi sederhana nilai r antara variabel X_1 terhadap variabel X_2 adalah 0,726. Dari hasil pengujian menunjukkan terdapat hubungan positif antara Orientasi Politik terhadap Partisipasi Politik. Sehingga hipotesis (Ada hubungan Orientasi Politik terhadap Partisipasi Politik) dalam penelitian ini dapat diterima (H_0 ditolak dan H_a diterima). Dapat disimpulkan bahwa ada hubungan positif antara Orientasi Politik terhadap Partisipasi Politik Kota Kupang dalam Pilkada Walikota Kupang Tahun 2017.

Berdasarkan perhitungan korelasi sederhana signifikansi dengan uji t , t_{hitung} antara Partisipasi Politik terhadap Perilaku Pemilih adalah $t_h 1,728 > t_t 1,66629$ yang berarti terdapat hubungan signifikan antara Orientasi Politik terhadap Partisipasi Politik. Dapat disimpulkan bahwa apabila Orientasi Politik mempunyai hubungan signifikan terhadap Partisipasi Politik, maka Partisipasi Politik juga mempunyai hubungan signifikan terhadap Orientasi Politik dalam Pilkada Walikota Kupang Tahun 2017.

d) Hubungan Orientasi Politik dan Partisipasi Politik terhadap Perilaku Pemilih

Berdasarkan perhitungan korelasi ganda antara variabel X_1 dan X_2 (secara bersama-sama) terhadap variabel Y adalah 0,411. Dari hasil pengujian menunjukkan terdapat hubungan antara Orientasi Politik dan Partisipasi Politik terhadap Perilaku Politik. Sehingga hipotesis (Ada hubungan Orientasi Politik dan Partisipasi Politik terhadap Perilaku Pemilih) dalam penelitian ini dapat diterima (H_0 ditolak dan H_a diterima). Sedangkan kontribusi atau sumbangan secara bersama-sama Orientasi Politik dan Partisipasi Politik terhadap Perilaku Pemilih adalah 16,9% sedangkan 83,1% ditentukan oleh variabel lain. Dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara Orientasi Politik dan Partisipasi Politik terhadap Perilaku Pemilih Kota Kupang dalam Pilkada Walikota Kupang Tahun 2017.

Berdasarkan perhitungan korelasi ganda antara Orientasi Politik dan Partisipasi Politik terhadap Perilaku Pemilih adalah Sig. F change $0,001 < 0,05$, yang berarti terdapat hubungan signifikan antara Orientasi Politik terhadap Partisipasi Politik. Maka keputusannya adalah H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, Orientasi Politik dan Partisipasi Politik berhubungan signifikan secara bersama-sama terhadap Perilaku Politik dalam Pilkada Walikota Kupang tahun 2017.

Berdasarkan perhitungan korelasi ganda signifikansi dengan uji F, antara Orientasi Politik dan Partisipasi Politik terhadap Perilaku Pemilih adalah $F = 7,303 > 3,12$ (nilai F tabel) dan $\text{sig} = 0,001 < 0,05$ yang berarti Orientasi Politik dan Partisipasi Politik secara bersama-sama berhubungan signifikan terhadap Perilaku Pemilih. Dapat disimpulkan bahwa apabila Orientasi Politik dan Partisipasi Politik mempunyai hubungan signifikan terhadap Perilaku Pemilih, maka Perilaku Pemilih juga mempunyai hubungan signifikan terhadap Orientasi Politik dan Partisipasi Politik dalam Pilkada Walikota Kupang Tahun 2017.

4. Temuan Pada Penelitian Ini Mendukung Pendapat atau Penelitian yang Relevan

Analisa di atas menghasilkan empat temuan. *Pertama*, ada hubungan positif orientasi politik terhadap perilaku pemilih, hipotesis penelitian ini mendukung pendapat (Syafie & Azhari, 2009: 88) bahwa orientasi politik membicarakan fenomena masyarakat, tetapi dalam membicarakan politik secara luas, merupakan faktor yang mengkaji berbagai pola perilaku seseorang atau sekelompok orang yang orientasinya berkisar tentang kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum norma kebiasaan yang berjalan, dipikir, dikerjakan, dan dihayati oleh anggota masyarakat setiap harinya.

Kedua, Ada hubungan positif partisipasi politik terhadap perilaku pemilih, hipotesis penelitian ini mendukung pendapat (Rauf & Noor, dkk, 2009: 284), bahwa keterlibatan politik seseorang, sejauh mana orang itu melihat politik sebagai sesuatu yang penting, memiliki minat terhadap politik, sering berdiskusi mengenai isu-isu politik, dan sejauh mana orang itu terlibat di dalam organisasi atau asosiasi sukarela (*voluntary associations*). *Ketiga*, ada hubungan positif orientasi politik terhadap partisipasi politik, hipotesis penelitian ini mendukung pendapat (Syafie, 2008: 42), bahwa partisipasi politik rakyat dapat didefinisikan sebagai warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. *Keempat*, ada hubungan orientasi politik dan partisipasi politik terhadap perilaku pemilih, hipotesis penelitian ini mendukung pendapat (Syafie, 2008: 42), bahwa partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta, dalam pencapaian organisasi.

Hipotesis penelitian ini juga mendukung penelitian yang relevan oleh (Setiajid, 2011), hasil penelitian menunjukkan bahwa yang mempengaruhi pemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnya adalah faktor yang dominan yang mempengaruhi pemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnya adalah faktor pengaruh dari pilihan sendiri 40% dan orang tua 32%. Juga mendukung penelitian (Putri, 2016), Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pilihan politik keluarga lebih baik daripada mengikuti pilihan politik sendiri sebesar 91,7%. Juga mendukung penelitian (Aminudin, 2011), faktor utama yang mempengaruhi perilaku pemilih yaitu orientasi kandidat dan orientasi isu.

KESIMPULAN

Orientasi Politik masyarakat Kota Kupang dalam Pilkada Walikota harus memilih calon kepala daerah berdasarkan visi, misi, atau program kerja yang ditawarkan, program kerja yang memberikan kesejahteraan untuk masyarakat Kota Kupang. Jangan memilih kepala daerah karena ada hubungan keluarga atau berasal dari daerah yang sama, atau karena memiliki agama.

Partisipasi Politik masyarakat Kota Kupang dalam Pilkada Walikota harus mendukung setiap proses politik yang ada, dengan ikut berpartisipasi memilih dalam setiap Pemilu yang ada. Ikut berpartisipasi dalam mengontrol kebijakan yang tidak mensejahterakan masyarakat.

Perilaku Pemilih masyarakat Kota Kupang dalam Pilkada Walikota jangan terlibat dalam transaksi-transaksi dengan calon kepala daerah, yang bersifat sementara hanya untuk kepentingan diri sendiri, tanpa memikirkan kepentingan bersama.

REFERENSI

- Agustino Leo. 2014. *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*. Bandung: Alfabet.
- Alifuddin Moh. 2012. *Berdomokrasi: Panduan Praktis Perilaku Demokratis*. Jakarta Timur: MAGNAScript Publishing.
- Aminudin Suryana. 2011. *Perilaku Politik Di Indonesia*. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiralodra, Indramayu.
- Amir M. Taufiq. 2015. *Merancang Kuisisioner: Konsep dan Panduan Untuk Penelitian Sikap, Kepribadian & Perilaku*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Arikunto Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bau Koli Yanuarius. 2003. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama.
- Budiardjo Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiman Arief. 1995. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hamid Farid & Budianto Heri. 2011. *Ilmu Komunikasi: sekarang dan Tantangan Masa Depan*. Jakarta: Kencana.
- Hendri Deni Denden. 2016. *Argumentasi Kebijakan Uji Publik Calon Kepala Daerah: Dilengkapi Undang-Undang Pilkada*. Depok: Pustaka Kemang.
- [Http://kilastimor.com/2016/08/sumbang-saran-keterpilihan-politik-tinjauan-dinamika-politik-kota-kupang/](http://kilastimor.com/2016/08/sumbang-saran-keterpilihan-politik-tinjauan-dinamika-politik-kota-kupang/) (diakses 2/26/2017)
- [Http://kupang.tribunnews.com/2017/02/22/pengamat-partisipasi-rendah-dalam-pilkada-kota-kupang-akibat-pilihan-terbatas](http://kupang.tribunnews.com/2017/02/22/pengamat-partisipasi-rendah-dalam-pilkada-kota-kupang-akibat-pilihan-terbatas) (diakses 2/26/2017)
- [Http://sergapntt.mlblogs.com/2012/03/18/pemilih-bukan-kerbau/](http://sergapntt.mlblogs.com/2012/03/18/pemilih-bukan-kerbau/) (diakses 2/26/2017)
- Maksudi Iriawan Beddy. 2013. *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoretik dan Empirik*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mas'oeud Mohtar & MacAndrews Colin. 2008. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Univertity Press.
- Mopeng Esther Dwidyawati. 2016. *Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Minahasa Utara Periode 2016-2021 (Studi Di Desa Sawangan Kecamatan Airmadidi)*. Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sam Ratulangi, Manado.

- Noor Juliansyah. 2015. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Parsa I Made. 2013. *Metodologi penelitian Pendidikan (MPP)*. Bahan Ajar Mandiri, Universitas Nusa Cendana.
- Pramesti Ketut. 2015. *Kupas Tuntas Data Penelitian dengan SPSS 22*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Purboyo Edie. 2014. *Analisis Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Walikota Makassar 2013 (Study Kasus: Keterpilihannya Danny Pomanto-Syamsu Rizal)*. Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Putri Darma Agustin. 2016. *Orientasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015 (Studi Pada Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling)*. Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Ranadirekta Hendarmin. 2009. *Visi Bernegara: Arsitektur Konstitusi Demokratik*. Bandung: Fokusmedia.
- Rauf Maswadi & Noor Firman, dkk. 2009. *Sistem Presidensial & Sosok Presiden Ideal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rudy T. May. 2009. *Pengantar Ilmu Politik: Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sano Otto Hans & Alfredsson Gudmundur. 2003. *Hak Asasi Manusia dan Good Governance: Membangun Suatu Keterkaitan*. Jakarta: CV. Rencong Jaya Sakti.
- Sekaran Uma. 2000. *Research Methods For Business*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiajid. 2011. *Orientasi Politik Yang Mempengaruhi Pemilih Pemula Dalam Menggunakan Hak Pilihnya Pada Pemilihan Walikota Semarang Tahun 2010 (Studi Kasus Pemilih Pemula Di Kota Semarang)*. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.
- Soenarko. 2005. *Public Policy: Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisis Kebijakan Pemerintah*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarto Hetifah Sj. 2009. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Supardi. 2014. *Aplikasi Statistik dalam Penelitian: Konsep Statistika yang Lebih Komprehensif*. Jakarta: Change Publication.
- Surbakti Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Syafiie Kencana Inu. 2008. *Teori dan Analisis Politik Pemerintahan: Dari Orde Lama, Orde Baru Sampai Reformasi*. Jakarta: PT. Perca.
- Syafiie Kencana Inu & Azhari. 2009. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditma.

Tim Puskapol. 2014. *Buku Panduan Pendidikan Pemilih Tentang Transaksi Politik Dalam Pemilu*. Pusat Kajian Politik-Departemen Ilmu Politik Fisip-UI.

Utomo Warsito. 2014. *Kristianitas dalam Kancah Perpolitikan Nasional: Kumpulan Pemikiran Analitis Tentang Nilai-nilai Kristiani dalam Perpolitikan di Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia.

Varma S. P. 2001. *Teori Politik Modern*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Yusuf Muri. 2015. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada media Group.

Zuriah Nurul. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan-Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksar.